

DISTRIBUSI

PENDAPATAN



2019

Kota Palangka Raya

ANALISIS DISTRIBUSI PENDAPATAN KOTA PALANGKA RAYA 2019

Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm
Jumlah Halaman : iv + 22 halaman

KATA PENGANTAR

Buku Distribusi Pendapatan Penduduk Kota Palangka Raya Tahun 2019 ini merupakan publikasi yang diterbitkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palangka Raya bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya. Buku ini diterbitkan sebagai respon terhadap permintaan data baik untuk kepentingan pemerintah maupun masyarakat pengguna data.

Penyajian publikasi ini memuat data dan informasi untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan penduduk Kota Palangka Raya beserta analisisnya seperti penentuan tingkat ketimpangan pendapatan berdasarkan kriteria Bank Dunia dan Koefisien Rasio Gini (Metode Oshima) keadaan tahun 2019. Diharapkan buku ini dapat memberikan informasi sebagai acuan dalam rangka perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan di Kota Palangka Raya.

Meskipun publikasi ini telah diupayakan kelengkapan dan penyempurnaan data yang disajikan, tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan pemakai data secara maksimal. Untuk perbaikan publikasi ini tanggapan dan saran-saran dari pemakai sangat diharapkan.

Semoga penyajian data statistik ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam rangka menyusun dan melaksanakan pembangunan yang kita cita-citakan.

**Kepala Bappedalitbang Kota Palangka Raya
Selaku Penanggung Jawab**

Ir. Harry Maihadi
NIP. 19630504 199303 1 020

**Kepala BPS Kota Palangka Raya
Selaku Ketua Tim Penyusun**

AGIE, SH, M.Hum
NIP. 19631011 198403 1 002

D
A
F
T
A
R
I
S
I

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.Latar Belakang	1
2.Tujuan Penghitungan Rasio Gini dan Distribusi Pendapatan	4
3.Sumber Data	4
4.Metodologi Pengukuran Tingkat Pemerataan	5
4.1 Kriteria Bank Dunia	5
4.2 Kurva Lorenz	6
4.3 Rasio Gini	7
II. GAMBARAN UMUM PEREKONOMIAN	8
III. ANALISIS RASIO GINI DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN	10
1.Rasio Gini	10
1.1 Rasio Gini Menurut Total Penduduk	10
1.2 Rasio Gini Menurut Daerah Perkotaan dan Pedesaan	11
1.3 Rasio Gini Menurut Lapangan Usaha	13
1.4 Rasio Gini Menurut Status Pekerjaan Utama	13
1.5 Rasio Gini Menurut Tingkat Pendidikan	14
2.Distribusi Pendapatan Penduduk	14
3.Kurva Lorenz	16
IV. PENUTUP	18
Lampiran	20

Tabel 1. Rasio Gini Kota Palangka Raya, 2017-2019	20
Tabel 2. Distribusi Pendapatan Kota Palangka Raya Menurut Kriteria Bank Dunia, 2017-2019	20
Tabel 3. Rasio Gini Kota Palangka Raya Menurut Tipe Daerah, 2019	20
Tabel 4. Rasio Gini Penduduk 10 tahun Ke atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha, Kota Palangka Raya 2019	21
Tabel 5. Rasio Gini Penduduk 10 tahun Ke atas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan, Kota Palangka Raya 2019	22
Tabel 6. Rasio Gini Penduduk 10 tahun Ke atas Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan, Kota Palangka Raya 2019	22

**D
A
F
T
A
R

T
A
B
E
L**

**D
A
F
T
A
R

G
A
M
B
A
R**

Gambar 1.1 Kurva Lorenz	6
Gambar 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Palangka Raya 2014-2019 (persen)	8
Gambar 2.2 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 (persen)	9
Gambar 3.1 Perkembangan Rasio Gini Kota Palangka Raya 2015-2019 (persen)	10
Gambar 3.2 Kecenderungan Rasio Gini Menurut Wilayah di Kota Palangka Raya, 2017-2019	12
Gambar 3.3 Distribusi Pendapatan Kota Palangka Raya Menurut Kriteria Bank Dunia, 2019	15
Gambar 3.4 Kurva Lorenz Kota Palangka Raya, 2018-2019	16

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Oleh karena itu, strategi pembangunan ekonomi suatu daerah biasanya diarahkan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pengukuran pertumbuhan ekonomi umumnya menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. PDRB merupakan gambaran dari produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor-sektor produksi pada suatu daerah dalam kurun waktu satu tahun. Pertumbuhan ekonomi mensyaratkan PDRB yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Beberapa pihak berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan suatu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan pada suatu daerah.

Namun, sejalan dengan salah satu tujuan pembangunan ekonomi yaitu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, pertumbuhan ekonomi seharusnya disertai pendistribusian pendapatan yang adil dan merata. Oleh karena itu, tujuan dasar pembangunan ekonomi saat ini tidak hanya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk menciptakan pemerataan pendapatan antar lapisan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu memberikan manfaat yang berarti bagi anggota masyarakat yang paling miskin dan paling membutuhkan perbaikan taraf hidup. Dengan kata lain pembangunan akan dikatakan berhasil apabila pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai dengan pendistribusian pendapatan (*income distribution*) yang merata pada seluruh lapisan masyarakat.

Fenomena ketimpangan distribusi pendapatan masih merupakan persoalan kompleks yang dihadapi oleh negara-negara miskin dan berkembang di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dalam skala yang lebih kecil, persoalan ini juga dihadapi oleh daerah-daerah di Indonesia hingga ke tingkat kabupaten/kota.

Seperti halnya dalam pembangunan ekonomi nasional, pembangunan ekonomi daerah juga bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar untuk meningkatkan kinerja perekonomian daerah serta memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat. Strategi pembangunan yang dilaksanakan di daerah harus mengacu pada karakteristik yang dimiliki daerah dengan mendayagunakan potensi sumber daya manusia, sumber-sumber fisik serta kelembagaan lokal. Peran pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan pembangunan memiliki arti penting dalam menentukan keberhasilan tujuan pembangunan ekonomi.

Kota Palangka Raya yang memikul tanggung jawab besar untuk mewujudkan perekonomian yang baik. Hal ini tidak hanya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga harus mampu mewujudkan distribusi pendapatan yang merata di antara golongan masyarakat .

Untuk dapat menyusun perencanaan pembangunan yang kokoh, yang bermuara pada kepentingan rakyat pada umumnya, dan khususnya pada peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerintah daerah memerlukan dukungan ketersediaan data dan informasi yang lengkap, akurat, dan *up to date*. Salah satu data yang sangat penting dan berguna dalam rangka perencanaan pembangunan tersebut adalah Rasio Gini (*Koefisien Gini*) yang menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk dan Distribusi Pendapatan menurut kriteria Bank Dunia (*World Bank Criteria*).

Setiap wilayah, baik negara, provinsi maupun kabupaten/kota, yang melakukan pembangunan pada akhirnya akan menuju pada peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara merata. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menjadi lebih berarti jika diikuti pemerataan atas hasil-hasil pembangunan. Berbagai kebijakan ekonomi untuk peningkatan produksi akan lebih berarti jika manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, orientasi pemerataan hasil-hasil

pembangunan seharusnya menjadi muara dari seluruh kegiatan perekonomian suatu daerah.

Salah satu keluhan pembangunan yang sering dibicarakan bahkan dirasakan sampai lapis bawah adalah hasil-hasil pembangunan tidak bisa dinikmati secara merata, antara desa dan kota, antar daerah, antar sektor dan antar golongan pendapatan. Hal inilah yang biasa disebut ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial, dan lebih lanjut kalau tidak dicegah secara cermat akan mengarah kepada keangkuhan dan menimbulkan kecemburuan sosial.

Dengan memperhatikan perkembangan sosial ekonomi yang terjadi selama ini, banyak ahli ekonomi berpendapat bahwa penanggulangan ketimpangan pendapatan ini tidak saja penting dan perlu ditinjau dari sudut pertimbangan moral, tetapi mendesak pula untuk ditinjau dari ancaman ketegangan sosial atau kecemburuan sosial yang terselubung di dalamnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi seringkali dibarengi kenaikan atau membesarnya tingkat ketimpangan pendapatan (semakin tidak merata). Pertumbuhan ekonomi yang pesat bukan saja membawa ketimpangan pendapatan yang tinggi tetapi juga menimbulkan kemiskinan pada sebagian penduduk.

Hal yang patut dipertanyakan "seberapa jauh jarak antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan rendah berdasarkan wilayah pembangunan di Kota Palangka Raya?". Oleh karena itu, informasi terkait tentunya dapat menunjang perencanaan pembangunan. Ada banyak indikator yang dapat mengukur kesenjangan ini, tetapi indikator yang sering digunakan untuk mengetahui kesenjangan distribusi pendapatan adalah Rasio Gini (*Gini Ratio*) dan Distribusi Pendapatan menurut Kriteria Bank Dunia. Melalui penyusunan publikasi ini gambaran mengenai kesenjangan dan distribusi pendapatan penduduk Kota Palangka Raya dapat dijadikan sebagai tolak ukur dan bahan evaluasi pembangunan yang telah dan sedang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama ini.

2. Tujuan Penghitungan Rasio Gini dan Distribusi Pendapatan

Penghitungan Rasio Gini dan Distribusi Pendapatan (menurut kriteria Bank Dunia) penduduk Kota Palangka Raya bertujuan untuk mendapatkan data/informasi tentang besarnya ketimpangan pendapatan masyarakat dan tingkat pemerataannya pada tahun 2017. Untuk memperoleh informasi yang lebih detail, dihitung pula Rasio Gini penduduk berumur 10 tahun ke atas yang bekerja menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan, jenis lapangan usaha utama dan status pekerjaan pada lapangan usaha utama. Informasi ini sangat dibutuhkan untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat pemerataan pendapatan pada masing-masing sektor ekonomi dan tingkatan pendidikan terutama pada penduduk usia 10 tahun ke atas yang bekerja.

3. Sumber Data

Sumber data utama yang digunakan dalam penghitungan Rasio Gini dan Distribusi Pendapatan Penduduk Kota Palangka Raya tahun 2019 adalah jumlah penduduk dan rata-rata pendapatan per kapita yang sudah dikelompokkan menurut kelasnya. Data ini diperoleh dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). SUSENAS secara rinci mengumpulkan data dan informasi tentang keadaan rumah tangga dan anggota rumah tangga (individu) dan pengeluaran makanan dan non makanan rumah tangga.

Dalam penghitungan Rasio Gini dan distribusi pendapatan, idealnya adalah menggunakan data pendapatan. Namun karena sulitnya mendapatkan informasi pendapatan yang lengkap dari responden, menyebabkan data pengeluaran lebih banyak dipakai. Data pengeluaran dipakai sebagai proksi untuk memperoleh data pendapatan, meskipun data pengeluaran masih mengandung beberapa keterbatasan, antara lain kurang terekamnya pengeluaran konsumsi di luar rumah dan kurang mencakup kelompok lapisan atas. Namun data pengeluaran yang dikumpulkan ini

masih relatif lebih mendekati keadaan sebenarnya dibandingkan dengan data pendapatan.

Penggunaan data pengeluaran sebagai proksi pendapatan sering menimbulkan perdebatan. Permasalahan yang sering timbul adalah :

- a. kebiasaan seseorang/rumah tangga yang selalu memenuhi kebutuhannya dengan sistem utang sehingga pengeluaran konsumsi rumah tangga tidak mencerminkan pendapatan rumah tangga yang sesungguhnya,
- b. pada suatu level tertentu konsumsi seseorang/rumah tangga kemungkinan tidak banyak mengalami perubahan dari waktu ke waktu, sehingga apabila data ini digunakan untuk membandingkan tingkat perubahan pemerataan pendapatan dari waktu ke waktu hampir tidak berubah.

Namun demikian bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, data Susenas ini dirasakan adalah yang paling mendekati kondisi sosial ekonomi masyarakat.

4. Metodologi Pengukuran Tingkat Pemerataan

Dari berbagai studi yang dilakukan oleh para ahli mengenai pemerataan pendapatan penduduk, terdapat beberapa metode untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan. Mulai dari metode statistik yang sederhana (seperti range, standar deviasi, indeks bowley, koefisien variasi, dan lain sebagainya) sampai pada metode empiris (seperti indeks Theil, indeks Oshima, indeks Kuznet, kurva Lorenz dan lain-lain). Di antara metode-metode tersebut di atas, terdapat dua metode yang populer digunakan baik di Indonesia maupun di beberapa negara, yaitu ukuran kriteria Bank Dunia dan Rasio Gini.

4.1 Kriteria Bank Dunia

Ukuran ketimpangan pendapatan dengan menggunakan kriteria Bank Dunia cukup sederhana dan mudah penghitungannya, yaitu berdasarkan persentase pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk berpendapatan rendah terhadap

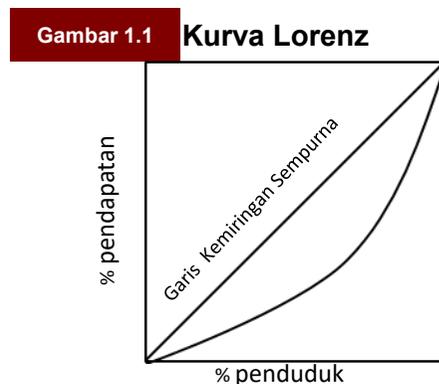
total pendapatan seluruh penduduk. Kriteria ketimpangan menurut Bank Dunia adalah sebagai berikut:

- a. Bila 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah menerima kurang dari 12 persen dari pendapatan total, maka ketimpangan pendapatan yang terjadi di suatu daerah adalah **tinggi**.
- b. Bila 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah menerima 12 - 17 persen dari pendapatan total, maka ketimpangan pendapatan yang terjadi di suatu daerah adalah **sedang**.
- c. Bila 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah menerima lebih dari 17 persen dari pendapatan total, maka ketimpangan pendapatan yang terjadi di suatu daerah adalah **rendah**.

Kriteria Bank Dunia tersebut dihitung berdasarkan rumus statistik, yaitu perhitungan “desil”.

4.2 Kurva Lorenz

Kurva Lorenz memperlihatkan hubungan kuantitatif antara persentase penerimaan pendapatan penduduk dengan persentase pendapatan yang benar-benar diperoleh selama kurun waktu tertentu.



Dari gambar di atas, sumbu horizontal menggambarkan persentase kumulatif penduduk, sedangkan sumbu vertikal menyatakan bagian dari total pendapatan yang

Sedangkan garis diagonal di tengah disebut **garis pemerataan sempurna**. Setiap titik pada garis diagonal merupakan tempat kedudukan persentase penduduk yang sama dengan persentase penerimaan pendapatan.

Semakin jauh jarak garis kurva Lorenz dari garis diagonal, semakin tinggi tingkat ketidakmerataannya. Sebaliknya semakin dekat jarak kurva Lorenz dari garis diagonal, semakin tinggi tingkat pemerataan distribusi pendapatannya.

4.3 Rasio Gini

Formula yang digunakan untuk menghitung tingkat pemerataan pendapatan dari koefisien gini atau Rasio Gini adalah :

$$G = 1 - \frac{\sum_{i=1}^k P_i (Q_i + Q_{i-1})}{10.000}$$

dimana :
G = Rasio Gini
P = Persentase penduduk
Q = Persentase kumulatif pengeluaran

Nilai Rasio Gini berada antara 0 dan 1. Bila nilai Rasio Gini bergerak mendekati 0 (nol) berarti tingkat pemerataan bertambah baik atau tingkat ketimpangan yang terjadi rendah, dan apabila nilai Rasio Gini bergerak mendekati 1 (satu) berarti tingkat ketimpangan yang terjadi tinggi.

Ketimpangan pendapatan berdasarkan nilai Rasio Gini menurut Oshima sebagai berikut:

- Tingkat ketimpangan pendapatan dikatakan **rendah** apabila nilai Rasio Gini < 0,3
- Tingkat ketimpangan pendapatan kategori **sedang** apabila nilai Rasio Gini 0,3 – 0,5
- Tingkat ketimpangan pendapatan **tinggi** apabila nilai Rasio Gini lebih besar dari 0,5

II. GAMBARAN UMUM PEREKONOMIAN

Proses pembangunan ekonomi selalu terkait dengan berbagai hal, beberapa di antaranya pertumbuhan ekonomi, keseimbangan dalam struktur ekonomi, serta pemerataan distribusi pendapatan. Keterkaitan ini menyebabkan timbulnya permasalahan. Beberapa pakar ekonomi merasa khawatir bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi bisa mempertegas ketimpangan distribusi pendapatan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah gambaran makro mengenai hasil dari proses pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh seluruh *stakeholders*, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.

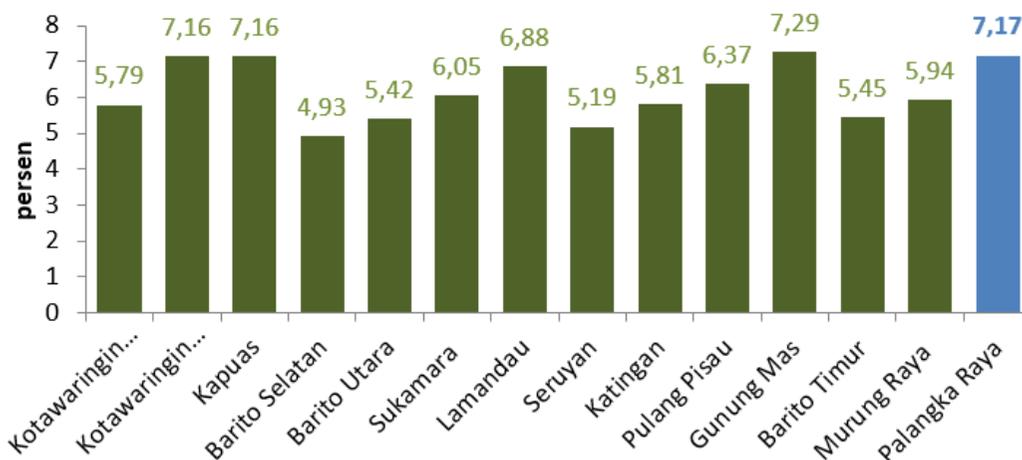


Sumber: BPS Kota Palangka Raya

Perekonomian Palangka Raya pada tahun 2019 mengalami penguatan pertumbuhan dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya (Gambar 2.1). Penguatan pertumbuhan ekonomi ini memberi petunjuk naiknya optimisme ekonomi pada Kota Palangka Raya dibandingkan dengan tahun 2018.

Gambar 2.2

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 (persen)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah

Kota Palangka Raya memiliki laju pertumbuhan ekonomi tertinggi di Provinsi Kalimantan Tengah. Sumber pertumbuhan yang memiliki andil besar di Kota Palangka Raya pada tahun 2019 adalah pada kategori Administrasi pemerintahan Perdagangan Besar dan Eceran, serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan konstruksi. Ini menunjukkan bahwa kontribusi ekonomi di Kota Palangka Raya di dominasi dari sektor jasa. Selain itu, Kota Palangka Raya juga merupakan kontributor terbesar ketiga untuk Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Kalimantan Tengah. Pada Tahun 2019, PDRB atas dasar harga berlaku di Kalimantan Tengah adalah sebesar Rp150.537,1 miliar dimana 12,12 persen dari nilai tambah tersebut merupakan kontribusi dari Kota Palangka Raya. Ini mengindikasikan bahwa Kota Palangka Raya merupakan salah satu kota yang memengaruhi kondisi perekonomian di Provinsi Kalimantan Tengah.

III. ANALISIS RASIO GINI & DISTRIBUSI PENDAPATAN

Rasio Gini dan distribusi pendapatan kriteria Bank Dunia ini dihitung berdasarkan data pengeluaran yang diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2019. Data tersebut disajikan menurut berbagai karakteristik, yaitu :

- Rasio Gini menurut total penduduk
- Rasio Gini menurut daerah perkotaan dan perdesaan
- Rasio Gini menurut lapangan usaha utama
- Rasio Gini menurut status pekerjaan utama
- Rasio Gini menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan

1. Rasio Gini

1.1. Rasio Gini Menurut Total Penduduk

Secara umum tingkat ketimpangan di Kota Palangka Raya termasuk dalam kategori sedang atau dengan kata lain pembagian pendapatan yang diterima penduduk agak kurang merata. Hal ini tergambar dari Rasio Gini Kota Palangka Raya pada tahun 2019 sebesar 0,357.



Sumber: BPS Kota Palangka Raya

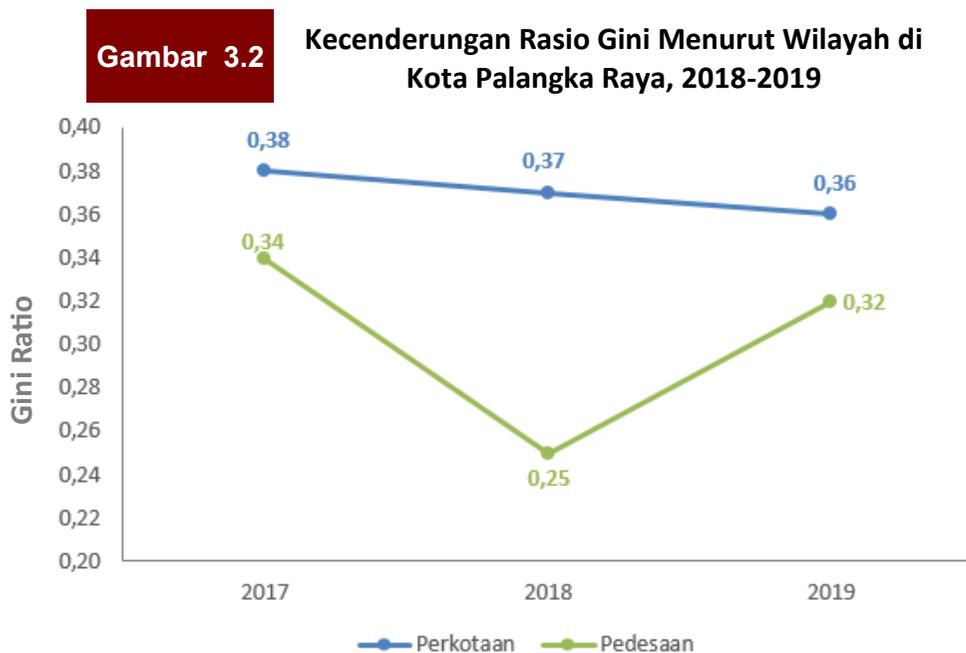
Jika dilihat perkembangannya selama kurun waktu empat tahun terakhir, tahun 2019 menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,013. Ini menunjukkan terjadinya penurunan ketimpangan di tahun 2019 yang mengindikasikan bahwa meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi diikuti dengan pemerataan pendapatan di Kota Palangka Raya. Secara umum dalam lima tahun terakhir, nilai Rasio Gini di Kota Palangka Raya masuk dalam kategori sedang.

Penurunan ketimpangan diikuti dengan penurunan persentase penduduk miskin di Kota Palangka Raya yang turun sebesar 0,12 poin persen dibandingkan Tahun 2018 yaitu sebesar 3,35 persen pada tahun 2019. Hal yang sama terjadi nilai indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan keparahan kemiskinan (P2) yang juga turun menjadi 0,43 dan 0,09 di tahun 2019. Penurunan angka kedalaman kemiskinan menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat yang memiliki pendapatan terendah atau miskin justru mendekati ke garis kemiskinan atau dengan kata lain semakin dekat untuk terbebas dari kemiskinan. Meskipun tetap golongan ini memiliki kemampuan daya beli sangat rendah sehingga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Mereka merupakan masyarakat yang berada pada lapisan terbawah atau “kerak kemiskinan”. Adanya penurunan keparahan kemiskinan juga menunjukkan kesenjangan yang semakin rendah di antara masyarakat miskin di Kota Palangka Raya.

1.2. Rasio Gini Menurut Daerah Perkotaan dan Perdesaan

Kota Palangka Raya walaupun termasuk dalam wilayah administrasi kota namun tidak semua daerahnya termasuk dalam kategori perkotaan. Dari segi ketersediaan fasilitas umum dan akses wilayah, masih ada beberapa daerah di Kota Palangka Raya yang termasuk dalam kategori perdesaan. Tingkat ketimpangan pendapatan antara daerah perkotaan dan perdesaan pun berada di kategori sedang. Di daerah perkotaan pembagian pendapatan cenderung lebih timpang dibandingkan daerah perdesaan. Hal ini terlihat dari Rasio Gini daerah perkotaan sebesar 0,357 sedangkan nilai Rasio Gini di daerah perdesaan hanya sebesar 0,321.

Dalam tiga tahun terakhir, daerah perkotaan selalu lebih timpang dibandingkan di daerah pedesaan di Kota Palangka Raya. Hal ini disebabkan antara lain karena lebih beragamnya jenis pekerjaan di daerah perkotaan sehingga tingkat pendapatan juga lebih beragam. Sementara di pedesaan, sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian. Tahun 2019 menunjukkan harapan terkait dengan perbedaan tingkat kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan ini dapat bersama sama turun harus tertunda, kesenjangan daerah pedesaan justru ikut membesar dan hampir menyamai perkotaan.



Sumber: BPS Kota Palangka Raya

Pada tahun 2019, nilai Rasio Gini di pedesaan justru kembali mengalami kenaikan yang cukup tinggi sehingga rasio gini pedesaan tahun 2019 kembali berada pada kategori sedang yaitu diatas 0,3. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan/ ketimpangan pendapatan di daerah pedesaan kembali naik setelah tahun 2018 turun dibawah 0,3. Kembali naiknya rasio gini di pedesaan ini menunjukkan bahwa belum stabilnya perekonomian di wilayah pedesaan Kota Palangka Raya sehingga diperlukan

upaya yang kontinu sehingga penurunan kesenjangan dapat terjadi secara perlahan dan berkesinambungan. Hal ini tidak akan lepas dari peranan Pemerintah Daerah dalam upayanya untuk meningkatkan pembangunan perekonomian di Kota Palangka Raya secara menyeluruh baik di perkotaan dan pedesaan. Peranan Pemerintah Daerah sebagai pengambil kebijakan harus optimal dalam membangun masyarakat yang produktif sehingga masyarakat mampu berpikir kreatif, inovatif dan mandiri. Selain peran dari Pemerintah Daerah, kepedulian dan partisipasi dari masyarakat memiliki peranan yang penting dalam pembangunan ekonomi. Masyarakat harus terbuka terhadap segala perubahan yang berdampak positif.

1.3. Rasio Gini Menurut Lapangan Usaha

Tingkat ketimpangan pendapatan pada masing-masing lapangan usaha menurut kriteria Oshima bervariasi antar lapangan usaha. Dari 25 lapangan usaha, sektor Aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis memiliki nilai rasio gini tertinggi yaitu 0,417 dan termasuk di kategori ketimpangan tinggi. Sementara sektor Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja memiliki nilai rasio gini paling kecil yaitu 0,00.

Tahun 2019 ini sebagian besar lapangan usaha memiliki ketimpangan yang rendah, hanya sembilan lapangan usaha yang masuk dalam kategori sedang. Dari semua sektor yang termasuk dalam kategori sedang hanya Sektor Aktivitas Professional, Ilmiah dan Teknis yang nilainya diatas 0,4 sedangkan delapan lainnya bernilai di bawahnya. Hal ini memberikan kita informasi bahwa sudah hampir meratanya distribusi pendapatan di Kota Palangka Raya jika dilihat pada setiap kelompok lapangan usaha.

1.4. Rasio Gini Menurut Status Pekerjaan Utama

Ditinjau dari status pekerjaan utama, dari enam status pekerjaan hanya yang statusnya pekerja bebas yang memiliki ketimpangan rendah, sedangkan lima lainnya

masuk dalam kategori ketimpangan sedang. Nilai rasio gini tertinggi ada pada kelompok berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar yaitu sebesar 0,39 dengan kategori ketimpangan sedang, dan terendah pekerja bebas dengan nilai 0,159. Kondisi ini rasio berdasarkan status pekerjaan ini terlihat masih labil dan dinamis. Kelompok Berusaha Dibantu baik oleh buruh tetap/dibayar maupun tidak tahun ini berada pada kategori sedang, padahal tahun sebelumnya berada pada kategori rendah. Begitu juga dengan pekerja bebas yang tahun ini masuk dalam kategori rendah tahun sebelumnya ada di kategori sedang dengan nilai rasio gini 0,322

1.5. Rasio Gini Menurut Tingkat Pendidikan

Pembagian pendapatan menurut angka Rasio Gini untuk penduduk 10 tahun ke atas dengan latar belakang pendidikan yang berbeda cenderung sama. Nilai Rasio Gini ini tergolong pada kategori sedang menurut Oshima untuk seluruh latar belakang pendidikan kecuali untuk tingkat pendidikan D1/D2/D3 yang masuk pada kategori rendah.

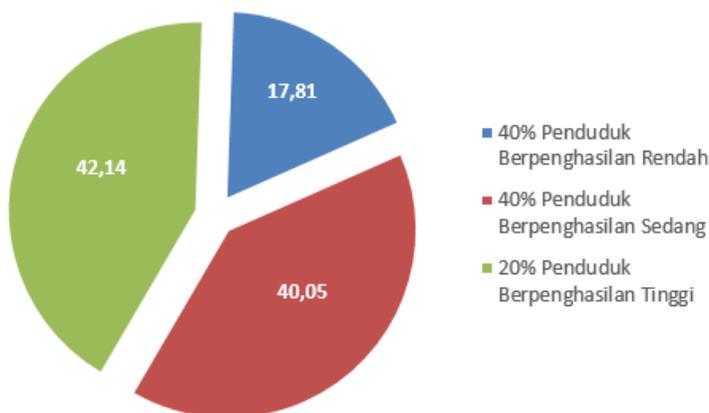
Bila ditinjau menurut besar kecilnya Rasio Gini maka golongan pendidikan dengan Rasio Gini yang paling rendah adalah D1/D2/D3 yaitu sebesar 0,29. Nilai tersebut sedikit lagi masuk dalam kategori sedang, tingkat pendidikan lain pun cenderung mendekati angka 0,3 yang berarti sangat mungkin terjadi perubahan menuju kategori rendah dalam waktu dekat. Kecenderungan Rasio Gini pada latar belakang pendidikan ini menunjukkan upah yang diterima relatif merata. Sedangkan Rasio Gini tertinggi adalah penduduk 10 tahun ke atas dengan latar belakang pendidikan SD ke bawah yaitu sebesar 0,37 namun masih berada dalam kelompok sedang.

2. Distribusi Pendapatan Penduduk

Selain dari nilai Rasio Gini, tingkat pemerataan pendapatan penduduk dapat juga ditentukan berdasarkan kriteria Bank Dunia. Pada tahun 2019 menurut total

penduduk, kelompok 40 persen penduduk berpenghasilan rendah (masyarakat lapis bawah) menyerap sebanyak 17,02 persen dari total pendapatan, kelompok 40 persen penduduk berpenghasilan sedang mendapat 40,47 persen dan kelompok 20 persen penduduk berpenghasilan tinggi mendapat 42,50 persen. Berdasarkan kriteria Bank Dunia, dapat dikatakan bahwa distribusi pendapatan di Kota Palangka Raya tahun 2019 masih tergolong merata, dimana penduduk kelompok berpenghasilan rendah menerima lebih dari 17 persen dari pendapatan total di Kota Palangka Raya.

Gambar 3.3 Distribusi Pendapatan Kota Palangka Raya Menurut Kriteria Bank Dunia, 2019



Sumber: BPS Kota Palangka Raya

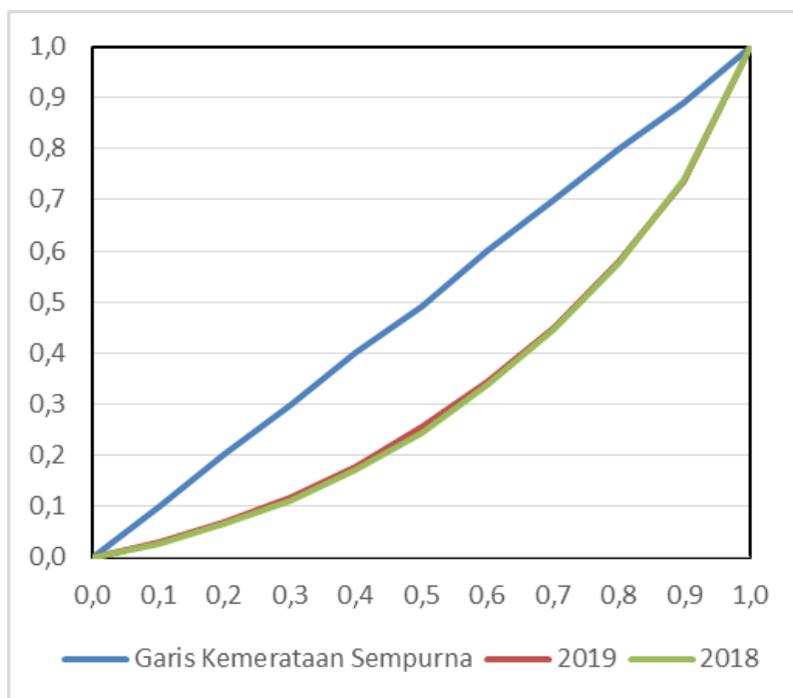
Distribusi pendapatan menunjukkan porsi pendapatan 40 persen masyarakat dengan pendapatan terendah mengalami peningkatan, dari 17,02 persen (2018) menjadi 17,81 persen (2019). Berbeda halnya dengan pendapatan untuk kelompok 40 persen berpendapatan sedang yang turun dari 40,47 persen (2018) menjadi 40,05 persen (2019). Penurunan terjadi juga pada kelompok 20 persen masyarakat berpenghasilan tinggi dari 42,50 persen (2018) menjadi 42,14 persen (2019). Jika dilihat dari kriteria distribusi pendapatan menurut Bank Dunia maka ketimpangan pendapatan antar penduduk di Kota Palangka Raya masih termasuk dalam kategori

rendah sehingga patut diapresiasi dan disyukuri. Namun 17,02 persen hanya sedikit diatas batas antara tingkat ketimpangan rendah dan sedang yaitu di batas 17 persen sehingga masih diperlukan perhatian agar tetap masih perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah, terlebih untuk kelompok penduduk yang berpenghasilan rendah yang dalam 2 (dua) tahun terakhir ini mengalami penurunan pendapatan. Laju pertumbuhan ekonomi yang meningkat di tahun 2019 terlihat juga diikuti oleh berkurangnya kesenjangan distribusi pendapatan penduduk di Kota Palangka Raya.

3. Kurva Lorenz

Kurva Lorenz distribusi pendapatan penduduk di Kota Palangka Raya pada tahun 2019 bergeser jika dibandingkan dengan tahun 2018. Berdasarkan Gambar 3.4, distribusi pendapatan penduduk pada tahun 2019 lebih merata jika dibandingkan tahun 2018.

Gambar 3.4 Kurva Lorenz Kota Palangka Raya, 2018-2019



Sumber: BPS Kota Palangka Raya

Bila dilihat Gambar 3.4, mulai penduduk 50 persen ke bawah kurva Lorenz tahun 2019 makin mendekati garis pemerataan sempurna dibandingkan tahun 2018. Jadi, pada golongan menengah ke bawah ketimpangan semakin berkurang. Pemerintah Kota Palangka Raya perlu untuk terus menjalankan kebijakan pemerataan pendapatan yang tepat sasaran, efektif, dan efisien agar ketimpangan terus turun dan tidak semakin meningkat.

IV. PENUTUP

Seperti halnya dalam pembangunan ekonomi nasional, pembangunan ekonomi daerah juga bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar untuk meningkatkan kinerja perekonomian daerah serta memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator dari keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut harus disertai dengan pemerataan pendapatan masyarakat, sehingga hasil-hasil pembangunan tersebut dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat agar tidak berdampak pada kesenjangan sosial.

Berdasarkan nilai Rasio Gini, ketimpangan di Kota Palangka Raya berada pada kategori sedang yaitu sebesar 0,357. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, distribusi pendapatan di Kota Palangka Raya ketimpangannya menurun. Daerah perkotaan masih memiliki ketimpangan yang lebih tinggi dibanding di pedesaan walaupun tidak signifikan. Rasio Gini di pedesaan yang sempat turun tahun lalu kembali masuk kategori sedang dengan nilai 0,321.

Ditinjau dari distribusi pendapatan penduduk di Kota Palangka Raya di tahun 2019. Porsi pendapatan penduduk golongan 40% pendapatan terendah di Kota Palangka Raya naik menjadi 17,81 persen. Hal ini berkaitan turunnya porsi pendapatan di kelompok menengah dan atas yang turun 0,42 dan 0,36 persen. Pertumbuhan ekonomi di Kota Palangka Raya pada tahun 2019 yang menunjukkan kecenderungan membaik juga terlihat memperbaiki kesenjangan pendapatan antar penduduk di Kota Palangka Raya. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dinikmati juga oleh semua golongan pendapatan.

Meskipun ketimpangan di Kota Palangka Raya di tahun 2019 menurun dibandingkan tahun sebelumnya, Pemerintah Daerah tidak boleh lengah dalam menentukan kebijakan perekonomian terutama untuk penduduk miskin dan juga penduduk yang tinggal di perdesaan. Evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan tersebut perlu dikaji secara berkala, sehingga kebijakan bantuan dan subsidi yang diberikan untuk kelompok ini efektif dan tepat sasaran.

Pentingnya menurunkan ketimpangan dikarenakan tingginya ketimpangan pada akhirnya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi serta menimbulkan konflik sosial karena tidak meratanya pembangunan di suatu wilayah. Pemerintah Kota Palangka Raya diharapkan dapat memberikan perhatian khusus dalam upaya mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. Peranan Pemerintah Daerah sebagai pengambil kebijakan harus optimal dalam membangun masyarakat yang produktif sehingga masyarakat mampu berpikir kreatif, inovatif dan mandiri karena kepedulian dan partisipasi dari masyarakat memiliki peranan yang penting dalam pembangunan ekonomi. Selain itu, kontribusi dan peran aktif para pelaku bisnis juga diperlukan untuk mengatasi masalah ketimpangan di Kota Palangka Raya agar kaum miskin tidak semakin terpinggirkan.

LAMPIRAN

Tabel 1. Rasio Gini Kota Palangka Raya , 2017-2019

No.	Tahun	Gini Ratio
(1)	(2)	(3)
1	2017	0,379
2	2018	0,370
3	2019	0,357

Tabel 2. Distribusi Pendapatan Kota Palangka Raya Menurut Kriteria Bank Dunia, 2017-2019

No.	Kelompok penduduk	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	40 % Kelompok penduduk penghasilan rendah	17,15	17,02	17,81
2	40 % Kelompok penduduk penghasilan menengah	38,28	40,47	40,05
3	20 % Kelompok penduduk penghasilan tinggi	44,57	42,50	42,14

Tabel 3. Rasio Gini Kota Palangka Raya Menurut Tipe Daerah, 2019

No.	Tipe daerah	Gini Ratio
(1)	(2)	(3)
1	Kota	0,3566
2	Desa	0,3214
3	Kota+Desa	0,3571

Tabel 4. Rasio Gini Penduduk 10 tahun Ke atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha, Kota Palangka Raya 2019

No	Lapangan Usaha	Gini Ratio
1	Pertanian tanaman padi dan palawija	0,1595
2	Hortikultura	0,1972
3	Perkebunan	0,2874
4	Perikanan	0,2096
5	Peternakan	0,2601
6	Kehutanan dan pertanian lainnya	0,2184
7	Pertambangan dan penggalian	0,2742
8	Industri pengolahan	0,2848
9	Pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin	0,1174
10	Pengelolaan air, air limbah, daur ulang sampah, dan aktivitas remedi-asi	0,0408
11	Konstruksi	0,3295
12	Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	0,3490
13	Pengangkutan dan pergudangan	0,3896
14	Penyediaan akomodasi dan makan minum	0,3338
15	Informasi dan komunikasi	0,1736
16	Aktivitas keuangan dan asuransi	0,2170
17	Real estate	0,1408
18	Aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis	0,4174
19	Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan, dan penunjang usaha lainnya	0,3257
20	Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib	0,3013
21	Pendidikan	0,2990
22	Aktivitas kesehatan manusia dan sosial	0,3367
23	Kesenian, liburan dan rekreasi	0,2085
24	Aktivitas jasa lainnya	0,3476
25	Aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja	0,0000
	Total	0,3571

Tabel 5. Rasio Gini 10 tahun Ke atas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan, Kota Palangka Raya 2019

No.	Status Pekerjaan	Rasio Gini
(1)	(2)	(3)
1	Berusaha sendiri	0,3341
2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar	0,3297
3	Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	0,3913
4	Buruh/karyawan/pegawai	0,3606
5	Pekerja bebas	0,1587
6	Pekerja keluarga/tidak dibayar	0,3406

Tabel 6. Rasio Gini Penduduk 10 tahun Ke atas Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan, Kota Palangka Raya, 2019

No.	Tingkat Pendidikan	Rasio Gini
(1)	(2)	(3)
1	SD ke bawah	0,3723
2	SMP sederajat	0,3572
3	SMA sederajat	0,3058
4	D1/D2/D3	0,2858
5	D4/S1/S2/S3	0,3048

